

**PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nama: Isna A'yunin Nadhirah**

**Npm: 1851030373**

**Prodi: Akuntansi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2022 M**



**PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Akuntansi  
Syariah

**Oleh:**

**Nama: Isna A'yunin Nadhirah**

**Npm: 1851030373**

**Prodi: Akuntansi Syariah**

**Pembimbing I: Dr. H Rubhan maskur, M.Pd.**

**Pembimbing II: Suhendar, SE, MSAk., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pajak bumi dan bangunan dimana pada masa pandemi covid-19 membuat kenaikan pajak bumi dan bangunan di kecamatan pringsewu dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu tidak stabil. Pajak menjadi sumber pendapatan penting daerah salah satunya pajak bumi dan bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bagaimana kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu dalam perspektif ekonomi islam

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan SPSS untuk mengolah datanya. Jumlah masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 orang. Data yang digunakan berupa data quesioner dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan ini adalah sumber data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari masyarakat kecamatan pringsewu yang terkena dampak dari wabah covid 19. Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku buku referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kenaikan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu karena hasil uji-t dimana nilai T hitung  $< t$  tabel yaitu  $0,454 < 2,019$ . Pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu dengan hasil uji-t dimana nilai T hitung  $< t$  tabel yaitu  $0,342 < 2,019$ . Tinjauan perspektif ekonomi islam ditinjau dari Islam

mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Namun pandemi covid-19 membuat penurunan pendapatan masyarakat ditinjau dari wawancara salah satu masyarakat kecamatan pringsewu yang mengeluh akibat pandemi covid-19 membuat penurunan pendapatan dari masyarakat tersebut. Data tersebut di perkuat dengan validnya dari pernyataan quesioner yang di berikan kepada narasumber.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi Dan Bangunan, Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi masyarakat, perspektif ekonomi islam.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the land and building tax which during the COVID-19 pandemic caused an increase in land and building taxes in Pringsewu District and resulted in unstable economic growth of the people in Pringsewu District. Taxes are an important source of regional income, one of which is land and building taxes. The formulation of the problem in this study is whether the increase in land and building taxes affects the economic growth of the community and how the increase in land and building taxes during the covid-19 pandemic affects the economic growth of the community in Pringsewu sub-district in an Islamic economic perspective.*

*This type of research uses quantitative methods by using field research and using SPSS to process the data. The number of people who were used as samples in this study were 44 people. The data used in the form of questionnaire data where the data is obtained from the field directly from the source, so that the data source in this study is the primary data source. This field research was carried out using data sourced from the Pringsewu sub-district community affected by the covid 19 outbreak. In addition to field research (field research), this type of research also uses library research, namely by looking for research data or information through reading journals. scientific books, reference books, documents containing data whose validity has been tested.*

*Based on the research proves that the increase in land and building taxes affects the economic growth of the community in Pringsewu sub-district because of the t-test results where the value of T count < t table is  $0.454 < 2.019$ . The COVID-19 pandemic affected the economic growth of the people in the Pringsewu sub-district with the results of the t-test where the T count < t table was  $0.342 < 2.019$ . A review of the Islamic economic perspective in terms of Islam defines economic growth as the continuous development of correct production factors that are able to contribute to human welfare. Thus, the growth of economic value according to Islam is a full thing. However, the*

*COVID-19 pandemic caused a decrease in people's income, in terms of an interview with one of the people in the Pringsewu sub-district who complained that the Covid-19 pandemic had resulted in an increase in the income of the community. The data is reinforced by the validity of the questionnaire statements given to the informants.*

***Keywords:*** *Land and Building Tax, Covid-19, Community Economic Growth, Islamic economic perspective.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
ISLAM

Alamat : Jl. Laskod. Hl. Endro Swarnie Sakarone I Telp. (0721) 701289 Bandar Lampung

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna A'yunin Nadhirah  
NPM : 1851030373  
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewa)" adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 03 Juli 2022

Penulis

  
METERAN  
TEMPER  
PROFAL19630905028  
ISNA A'yunin Nadhirah

1851030373





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu).**

Nama : **Isna A'yunin Nadhirah**  
Npm : **1851030373**  
Jurusan : **Akuntansi Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd**  
NIP. 19660402199503001

**Pembimbing II**

**Suhendar, SE., M.S.Ak., Akt**  
NIP.198510302019032013

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Ahmad Zuliansyah, M.M.**  
NIP. 197010251999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suramin Sukarame / Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)”. Disusun oleh **Isna A'yunin Nadhirah** NPM. 1851030373 Jurusan Akuntansi Syariah. Telah di ujian dalam sidang munaqasyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 20 Juli 2022. Pada Pukul 10.00-11.30 WIB.**

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua	:Fatih Fuadi, M.S.I.	(  )
Sekretaris	:Nanda Audia, M.M.	(  )
Penguji I	:Citra Etika, M.Si.	(  )
Penguji II	: Dr.H. Rubhan Masykur, M.Pd.	(  )

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

  
**Prof. Dr.tulus suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A**  
**NIP. 196010201988031005**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.**

**(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT. Tuhan yang maha esa pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga ku persembahkan kepada:

1. Kubingkai skripsi ini kepada kedua orangtuaku ayahanda Bajang Iskowo dan ibundaku tercinta Eliana, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih lebih dari segala galanya di dunia. Ini adalah salah satu bukti ananda dalam mengembang amanahmu untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1). Semoga ananda bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karyaku adalah doa doamu, mohon doa restumu dan barokah, untuk menyelesaikan amanah selanjutnya. Sesuai dengan Ridho Allah SWT.
2. Kuhadiahkan skripsi ini untuk Keluargaku, terimakasih atas bantuan, dukungan nasehat nasehat dan motivasinya sehingga skripsi yang sederhana ini bisa di selesaikan tepat waktu.
3. Kakakku, yang tersayang yang sudah memberikanku printer agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
4. Kukadokan skripsi ini untuk sahabat sahabatku Terimakasih atas pengalaman, cerita suka duka yang telah kalian berikan.
5. Kuucapkan terimakasih untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

**Isna A'yunin Nadhirah** dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 22 november 1999, penulis adalah anak kedua dari ayahanda Bajang Iskowo dan Ibunda Eliana. Pendidikan penulis dimulai dari:

1. TK Kh.Gholib Pringsewu Dan Lulus Pada Tahun 2006
2. SD Negeri 1 Pringsewu Selatan Lulus Pada Tahun 2012
3. SMP Negeri 1 Pringsewu Lulus Pada Tahun 2015
4. SMA Negeri 1 Gadingrejo Lulus Pada Tahun 2018

Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada jurusan Akuntansi Syariah Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis

Isna A'yunin Nadhirah

1851030373

## KATA PENGANTAR

Bissmilahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)”**, Shalawat serta salam semoga Allah selalu memberikan Rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus penulis menyebutkan beberapa, sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak A. Zuliansyah S.Si.,M.M selaku Ketua akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada mahasiswa/i nya.
3. Bapak Dr. H Rubhan Maskur, M.Pd. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan menasehatiku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Suhendar, SE, MSAk.,Akt selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan menasehatiku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan fakultas konomi dan bisnis islam UIN raden intan lampung yang telah banyak

membantu serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung yang memberikan informasi setra data, referensi penulisan dan lain-lain.
7. kedua orangtua yang tercinta, ayahanda bajang iskowo dan ibunda eliana. Kakakku tersayang imam arya kharistiyah dan alista vurianti yang senantiasa mendoakanku, mendukungku, menasehatiku, serta memberikan semangat dan pelajaran yang sangat berharga untukku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan serta teman teman seperjuangan fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam raden intan lampungstudi akuntansi syariah angkatan 2018, terkhususnya kelas akuntansi syariah B yang selalu bersama dan berjuang dalam menghadapi proses perkuliahan hingga selesai proses skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun penyajian data dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran sangan diharapkan oleh penulis guna menyempurnakan karta tulis. Akhir kata, penulis mengucapkan beriburibu terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Penulis

Isna A'yunin Nadhirah

1851030373

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	15
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20



## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

A. Kajian Teori .....	22
1. Teori Perpajakan .....	22
2. Teori Atribusi.....	23
B. Pajak .....	23
1. Pengertian Pajak .....	23
2. Fungsi Pajak .....	25
3. Pajak Daerah.....	26
C. Pajak Bumi Dan Bangunan .....	27
1. Dasar Hukum.....	27
2. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan .....	27
3. Cara Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan .....	30
4. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan .....	31
5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan.....	32
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) .....	32
D. Virus Corona (COVID -19).....	34
E. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pringsewu	37
F. Perspektif Ekonomi Islam .....	40
G. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam .....	45
H. Kerangka Berfikir.....	47
I. Pengajuan Hipotesis .....	49

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	52
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	52
C. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data .....	53
D. Definisi Operasional Variabel .....	58
E. Instrumen Penelitian.....	60
F. Metode Analisis Data .....	61

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Pringsewu ..... 65  
B. Hasil Penelitian Dan Analisis ..... 67  
C. Analisis Data ..... 82  
D. Pembahasan..... 96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 110  
B. Saran ..... 111

**Daftar pustaka..... 112**

**Lampiran ..... 120**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2018-2021 .....	10
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pringsewu .....	53
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.2 Distirbusi Responden Berdasarkan Umur.....	68
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	68
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pringsewu.....	69
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	70
Tabel 4.6 Deskripsi Item Pernyataan Variabel kenaikan pajak bumi dan bangunan (X1).....	74
Tabel 4.7 Deskripsi Item Pernyataan Variabel pandemi covid-19 (X2).....	77
Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pringsewu (Y).....	81
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel kenaikan pajak bumi dan bangunan (X1) .....	82
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel pandemi covid-19 (X2).....	83
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pringsewu (Y).....	83
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas .....	84

Tabel 4.13 Sampel Kolmogorov-Smirnov .....	86
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Normalitas .....	87
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas .....	88
Tabel 4.16 Model Persamaan Regresi Linear Berganda .....	90
Tabel 4.17 Hasil Uji Parsial ( Uji T ).....	92
Tabel 4.18 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	94
Tabel 4.19 Uji Koefisien Determinasi Variabel (X1) Terhadap (Y).....	95
Tabel 4.20 Uji Koefisien Determinasi Variabel (X2) Terhadap (Y).....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	11
Gambar 1.2.....	11
Gambar 1.3.....	12
Gambar 2.1.....	48
Gambar 4.1.....	86
Gambar 4.2.....	89

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada awal perusulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan dalam memudahkan memahami skripsi ini maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah berjudul “*PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)*“. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta makna yang terkandung dalam judul, berikut penjelasan arti setiap kata pada penegasan judul tersebut:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh merupakan hubungan sebab akibat yang timbul dalam suatu penelitian antara satu variabel dengan variabel lainnya yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi.<sup>1</sup>

#### 2. Kenaikan

Kenaikan adalah perihal naik. Arti lainnya dari kenaikan adalah peningkatan<sup>2</sup>.

#### 3. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hlm.1045

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Hlm.543

subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>3</sup>

#### 4. Covid-19

Menurut *World Health Organization (WHO) Corona Virus Disease* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti *pneumonia*.<sup>4</sup>

#### 5. Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri.<sup>5</sup>

#### 6. Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, secara hukum masyarakat adalah menurut hukumnya sendiri, masyarakat yang memiliki mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri atau yang bekerja di sektor administrasi pemerintah.<sup>6</sup>

#### 7. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014) Hlm.437

<sup>4</sup> Raju Pratama Ritonga, “ *Analisis Kesadaran Konsumen Dalam Membeli Buah Dan Sayur Melalui E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19*” Fakultas Ilmu Pertanian, Usu, 2021, Hlm. 02

<sup>5</sup> Lincolin Arsyad, “*Ekonomi Pembangunan*” (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2010), Hlm. 96.

<sup>6</sup> Soerjono, Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*” (Jakarta: Pt Radja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 15.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), Hlm. 675

## 8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang penerapannya dengan nilai-nilai islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana pengaruh Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu).

### B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dimana saat ini Indonesia sedang melakukan perbaikan yang energetik. Pembangunan merupakan hobi yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan ini, sangat penting untuk menyadari kesulitan membiayai perbaikan di seluruh negeri. Salah satu hal yang membantu pemenuhan tercapainya keinginan perbaikan di seluruh negeri selain faktor sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber lain adalah penyediaan dana perbaikan yang cukup baik.<sup>9</sup>

Dari segi bentuk pendapatan dana, Indonesia memiliki penerimaan dari berbagai sektor termasuk penerimaan sektor pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain. sektor ini memiliki posisi yang sangat strategis dan merupakan elemen terpenting dan pasokan fundamental untuk membantu pembiayaan tata kelola

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, Et. Al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, Cet.3, 2010), Hlm. 15

<sup>9</sup> Nur Albet, *Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo*, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. 2013, Hlm. 1



dan perbaikan di seluruh negeri.<sup>10</sup> Dalam perkembangan modern, sangatlah penting untuk memiliki cukup pengaturan kembali keuangan karena faktanya peningkatan harus disalurkan dengan tenang dari daerah menengah hingga pusat, juga dalam semua faktor gaya hidup masyarakat Indonesia. Perbaikan ini berupaya untuk menuai perbaikan yang jujur dan merata di setiap daerah, agar terwujud masyarakat yang sejahtera, sederhana dan berkecukupan.

Untuk kelanjutan perbaikan ini, sangat penting untuk memiliki kisaran harga negara yang cukup baik dan mendukung dalam kegiatan perbaikan tersebut. Perkembangan ekonomi tersebut akan berdampak pada perbaikan di Indonesia. Pada fase ini dalam sejarah keuangan negara, beberapa target cakupan moneter nasional yang terkait dengan kisaran harga otoritas terdekat disebutkan, salah satunya adalah perpajakan.<sup>11</sup>

Pajak menjadi salah satu penerimaan yang sangat berpengaruh besar bagi negara. Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, peran pemerintah dalam perekonomian digolongkan dalam 3 peranan, yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi. Pemerintah dalam menjalankan perannya mengeluarkan biaya-biaya yang diperoleh dari berbagai sumber.

---

<sup>10</sup> Widodo, *pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) Hlm. 1

<sup>11</sup> Primasari, Delima Anggun And , Jaka Susila, S.H., M.Si., M.H. And , Ali Mukti, S.H., M.Hum. (2014), *Studi Evaluasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Baki*, Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 01

Dalam pandangan Ekonomi Islam, pajak (*Dharibah*) adalah suatu bentuk muamalah dalam moneter sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk keamanan, kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, tentu saja, sangat penting adanya tentara, polisi, pegawai dan peralatan lain, ahli medis dan rumah sakit, instruktur, dan gedung fakultas. Jika harta bersama dengan zakat, ghanimah, dan lain-lain tidak mencukupi, maka ulil Amri dapat menetapkan pajak (*Dharibah*) sebagai penghasilan tambahan dan dikumpulkan paling efektif pada saat terjadi kekosongan atau hilangnya Baitul Mal (Perbendaharaan Negara).<sup>12</sup>

Pajak merupakan salah satu aset pembiayaan pembangunan untuk perbaikan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pentingnya pengendalian pajak menjadi perhatian pembangunan. Ada banyak jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun di antaranya, pajak bumi dan bangunan sangat potensial dan strategis sebagai pemasok pendapatan negara untuk dapat membiayai pengelolaan dan perbaikan pembangunan.<sup>13</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan melalui cara-cara keadaan benda, khususnya bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan subjek (yang membayar) tidak lagi berperan dalam menghitung besaran pajak.<sup>14</sup> Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang

---

<sup>12</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 12

<sup>13</sup> Nur Albet, *Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo*, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. 2013, Hlm. 2

<sup>14</sup> Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014) Hlm. 437

Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan dalam UU PBB perlu mempertimbangkan hobi dan situasi jaringan sebagai wajib pajak. Dimana kemampuan membayar wajib pajak ingin diperhatikan karena masalah keadilan. Banyak tuntutan hukum dari wajib pajak yang mengalami tidak mampu membayar PBB karena jumlah pajak yang terutang kepada mereka jauh di atas kemampuan mereka, misalnya pensiunan yang menempati rumah di jalan protokol. Begitu juga dengan petani yang bergantung pada pencapaian tanggung jawab membayar tagihan PBB dari hasil panennya.<sup>15</sup>

Pajak Bumi dan Bangunan dapat digunakan untuk berbagai kemampuan dalam menentukan pedoman yang terkait dengan tanah dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang sangat kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyuplai penjualan yang sangat mampu bagi daerah. Menurut sejumlah ekonom muslim terkemuka, termasuk Yusuf Qardawi, Abdul Qadim Zallum, dan Gaz Inayah, sisteem perpajakan disebut adil jika memenuhi 3 standar, antara lain:

1. Pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang tidak diragukan lagi dapat dianggap penting dan untuk memahami tujuan maqashid; karena pungutan pajak bumi dan bangunan. memiliki kontribusi utama dalam pertumbuhan penjualan negara. Hal ini terlihat dari statistik tahun 2015 yang berkisar 0,31%.
2. Kedua, beban pajak sekarang tidak perlu lagi terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan rakyat untuk menanggungnya dan beban itu perlu dicairkan secara adil di antara semua orang yang bisa mengeluarkan uang untuk itu.

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hlm. 269

3. Ketiga, anggaran pajak yang masih harus dibayar pasti dibelanjakan untuk fungsi-fungsi yang membutuhkan pajak. Perangkat pajak yang tidak memenuhi standar tersebut dianggap sebagai penindasan dengan bantuan penggunaan otoritas terhadap rakyat.

Dalam Al-Qur'an (bahasa Arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS. At-Taubah ayat 29 :

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan buruk". (QS. At-Taubah : 29).<sup>16</sup>

Berdasarkan Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini juga

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2015), Hlm. 191

mengakibatkan semakin besar pula pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunan.<sup>17</sup>

Besarnya pajak yang akan ditanggung oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah dan bangunan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu dalam penetapannya harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, agar besaran pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya, sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Permasalahannya adalah bagaimana agar keadilan dalam penetapan Nilai Jual Obyek Pajak dapat terlaksana sehingga masyarakat rela membayar sesuai dengan nilai pajak yang ditetapkan.<sup>18</sup>

Kecamatan Pringsewu adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang pemerintah daerahnya sedang melaksanakan giat pembangunan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kecamatan Pringsewu merupakan bagian dari Kabupaten Pringsewu yang juga merupakan Ibu Kota dan pusat pemerintahan dari Kabupaten Pringsewu. Dipimpin oleh Maody Ary Nayzolla dengan populasi 81.776 jiwa dan kepadatan 1.707/km<sup>2</sup>. Kemudian, persentasi penduduk Kecamatan Pringsewu berdasarkan agama yang dianut yakni pemeluk agama islam 94,08%, kemudian kekristenan sebanyak 5,52%, dengan rincian katolik 4,10% dan protestan 1,42% pemeluk agama buddha 0,26%, hindu 0,13% dan lainnya 0,01%. Luas wilayah

---

<sup>17</sup> Khasanah, Umiatul (2017) “*Pengaruh Etika Wajib Pajak , Pemahaman Pajak, Diskriminasi, Dan Pandangan Sosial Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Semarang)*”. Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomi Unissula. Hlm. 15

<sup>18</sup> Mardiasmo, “*Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*”. Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. Hlm. 7

Kecamatan Pringsewu 48,49 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan.<sup>19</sup>

Adapun upaya peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besarnya di tempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat dan teliti.

Namun pada tiga tahun terakhir ini, tarif pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pringsewu meningkat drastis. Covid-19 mempengaruhi kenaikan dari nilai tarif sebesar 0,5% yang ditentukan oleh presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atau PBB-P2 resmi naik menjadi maksimal 0,5 persen seiring berlakunya undang-undang nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD. UU HKPD disahkan oleh presiden Jokowi pada Rabu 5 Januari 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada hari yang sama. Sesuai namanya, UU itu mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Dalam pasal 41 ayat (2), mengatur bahwa tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak lebih rendah dari tarif lahan lainnya. Ketentuan tarif PBB-P2 secara umum maupun untuk lahan pangan dan ternak ditetapkan kemudian oleh peraturan daerah (perda). Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP).<sup>20</sup>

Badan pendapatan daerah (bapenda) Pringsewu mencatat, penerimaan sektor pajak di tahun 2021 di Pringsewu mencapai Rp34 miliar. Jumlah ini kurang dari targetan pemerintah

---

<sup>19</sup> BPS Kabupaten Pringsewu, "Badan pusat statistik kabupaten Pringsewu dalam angka 2021" CV. Jaya Wijaya. Hlm.79

<sup>20</sup> <https://www.ekonomi.bisnis.com> diakses pada 10 Agustus 2022 pada pukul 13.18

Kabupaten Pringsewu, dimana pada tahun 2021 penerimaan pajak ditarget Rp 35 miliar. Kepala bidang pendapatan bapenda Pringsewu Ali Alhamidi mengatakan, target tersebut tidak terealisasi karena kendala utama yang dihadapi ada pada bidang pajak bumi dan bangunan (PBB). Dari catatan bapenda Pringsewu, banyak masyarakat wajib pajak yang belum melunasi tagihan PBB di tahun 2021.<sup>21</sup> Data tersebut dapat dilihat pada:

**Tabel 1.1**

**Data Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2018-2021**

<b>tahun</b>	<b>Target PBB</b>	<b>Realisasi PBB</b>	<b>% pencapaian</b>
2018	20.000.000.000	21.289.348.700	106,44%
2019	21.837.750.000	23.521.005.221	107,71%
2020	27.500.000.000	30.877.603.100	112,28%
2021	35.000.000.000	34.000.000.000	97,1%

*Sumber: survei statistik keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota.*

Data pajak bumi dan bangunan tersebut di dapat dari Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dimana pada tahun 2021 realisasi PBB di Kabupaten Pringsewu tidak mencapai target PBB yang di tentukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut adalah bukti bahwa pandemi covid-19 merubah pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Data tersebut diperkuat lagi dengan tarif pada awal tahun 2018 sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Kini di tahun 2021 meningkat menjadi seratus lima ribu rupiah. Dapat dilihat pada gambar 1.1 sampai 1.3

---

<sup>21</sup> <https://www.suara.com> diakses pada 16 agustus 2022. Pada pukul 21.13



**Gambar 1.1**

Pada tahun 2019 pajak bumi dan bangunan masih stabil



**Gambar 1.2**

Pada tahun 2020 ketika wabah covid 19. Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sebesar Rp105.584





**Gambar 1.3**

Data ini diambil dari salah satu kepala keluarga yang berkediaman di Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu. kenaikan dari Pajak bumi dan bangunan meningkat drastis diakibatkan oleh wabah covid 19. Lalu apa itu covid, covid adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dimana covid 19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. Sesuai hal tersebut, coronavirus hanya bisa berpindah

melalui perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan batuk dan bersin.<sup>22</sup>

Dampak dari covid bukan hanya itu saja. Pengaruh penerapan PPKM akibat covid-19 pun membuat perekonomian masyarakat menjadi menurun. Pengusaha banyak yang gulung tikar, masyarakat yang tadinya memiliki kegiatan sehari-hari seperti berdagang kini diberi batasan karena PPKM dan mempengaruhi seluruh kegiatan masyarakat. Kenaikan dari tarif pajak bumi dan bangunan ini membuat resah masyarakat, dimana yang tadinya keuangan hanya cukup untuk sehari-hari kini diberatkan lagi dengan kenaikan PBB yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Pringsewu.

Dari fenomena tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh peristiwa pandemi covid-19 membuat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Akibat dari kenaikan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pringsewu. Namun dilihat dari kenaikan pajak bumi bangunan tersebut, apakah pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan pringsewu menjadi lebih baik? Dan bagaimana dalam perspektif ekonomi islamnya?. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait pengaruh kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (studi pada masyarakat di kecamatan pringsewu).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

---

<sup>22</sup> Dwi Krismaroca, Alfi (2020) *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 Di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hlm. 01

## MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)”.

### **C. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan maka permasalahan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pajak bumi bangunan dalam perspektif ekonomi islam.
- b. Selama pandemi covid 19, membuat Pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dan apakah dampak dari kenaikan tersebut.
- c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan.
- d. Solusi kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten pringsewu.

#### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang di tetapkan sehingga dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. Maka penulis memberikan batasan penelitian tersebut:

- a. Penelitian yang diamati adalah wawancara terhadap 10 (sepuluh) orang kepala keluarga di tiap kecamatan pringsewu.
- b. Mengumpulkan tiap SPT yang dikeluarkan pihak pajak per rumah warga apakah sumber data konkrit dengan hasil wawancara.
- c. Mewawancarai perorangan tentang bagaimana pengaruhnya kenaikan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan pribadi perorangan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yakni :

1. Apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu dalam perspektif ekonomi islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid 19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu dalam perspektif ekonomi islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten pringsewu sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan akuntansi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri raden intan Lampung.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta menambah wawasan mengenai hal tersebut di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bagi masyarakat kecamatan pringsewu

Untuk mengetahui apakah dari kenaikan pajak bumi dan bangunan yang meningkat ini membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan pringsewu akibat wabah covid 19 semakin baik.

**G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)**

Penelitian tentang PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu) sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti:

1. Skripsi dengan judul PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014-2016, oleh agus firmansyah tahun 2018 yang berisi tentang pengaruh pajak bumi & bangunan terhadap pendapatan asli daerah di kota cilegon secara parsial dengan periode pengamatan selama 2014-2016 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi & Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon, data sekunder berupa data per bulan selama tiga tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sobri, Agus Firmansyah (2018), "*Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016(Studi Bpkad Kota Cilegon)*". Diploma Atau S1 Thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

2. Skripsi dengan judul PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR oleh muhammad akhsan tahun 2014 yang berisi tentang menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan secara simultan dan secara parsial, dengan nilai signifikansi sebesar 0,572 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari hasil regresi di atas nilai R squared ( $R^2$ ) sebesar 0,117, ini berarti 11,7 % variasi Pajak Bumi dan Bangunan, sisanya sebesar 88,3% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model.<sup>24</sup>
  
3. Artikel yang ditulis oleh Sarip, Aip Syarifudin dan Abdul Muaz berisi tentang MENGAJI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA. Desa selalu mendapatkan bantuan, mengarah pada keadaan atau melahirkan desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan mendasar bagaimana pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan. Hubungan antara demokrasi desa dengan arah perekonomian dan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mempengaruhi penanggulangan Covid-19, merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan. Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak wabah terhadap Perekonomian desa, pembangunan

---

<sup>24</sup> Muhammad, Ikhsan (2014) “*Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangun Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*”. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

desa yang sedang melanda dunia. Pandangan masyarakat desa telah mengalami krisis kepercayaan, akibat peran yang dimainkan pemerintah pusat dan daerah yang kurang memperhatikan desa sebagai pemerintahan mandiri kehilangan identitasnya. Demi terwujudnya suatu demokrasi desa di bidang perekonomian dan pembangunan, idealnya membangun karakter masyarakat yang bebas dari ketergantungan.<sup>25</sup>

4. Skripsi dengan judul KONTRIBUSI LAJU PERTUMBUHAN PBB-PP TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM oleh mugiyarti tahun 2018 yang berisi tentang perkembangan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang memegang peranan penting dalam memperoleh pendapatan asli daerah khususnya kabupaten pesawaran.<sup>26</sup>
5. Skripsi dengan judul PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM oleh SINTA LESTARI tahun 2016 yang berisi tentang bagaimana Sistem Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia dan apakah Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan dan tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dan Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pajak bumi dan bangunan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah jenis pengumpulan studi kepustakaan (library research), dimana dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dari buku-buku, artikel, karya ilmiah

---

<sup>25</sup> Sarip,Aip Syarifudin Dan Abdul Muaz “*Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa*” Universitas Muhammadiyah Cirebon.

<sup>26</sup> Mugiyarti, M (2018) “*Kontribusi Laju Pertumbuhan Pbb-Pp Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2016)*”. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Hasil Penelitian adalah Sistem Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia adalah pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan dimana subjek harus membayar terhadap objek yang dipunyai untuk kepentingan pembangunan Negara. Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan kharaj. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun kharaj memiliki objek yang sama, yaitu tanah Namun, pada PBB objeknya ditambah dengan bangunan. PBB dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan/atau bangunan, lain halnya dengan kharaj yang hanya dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut.<sup>27</sup>

6. Artikel yang ditulis oleh Rizal Muttaqin tentang PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dipandang sebagai bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Karena pertumbuhan ekonomi menjadi salahsatu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, ditengah pesatnya perkembangan dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan

---

<sup>27</sup> Sinta Lestari, (2016) “*Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam*” Thesis, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.



absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis isu pertumbuhan ekonomi yang akan dikaji dengan kacamata ekonomi Islam. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiranpemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah penulis menyusun menjadi 5 bab dalam bagian isi skripsi, dimana susunan tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian ini adalah dimana dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat latar belakang yang menjadi titik permasalahan yang akan di angkat. Identifikasi dan batasan masalah, rumusan

---

<sup>28</sup> Rizal muttaqin “*pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam*” program studi hukum ekonomi syariah (muamalah) STAI yapata al-jawami.

masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Pada bab ini peneliti menjelaskan uraian tentang teori teori yang berkaitan dengan pengaruh kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, Populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, Definisi operasional variabel, Instrumen penelitian, Uji validitas dan reliabilitas data, Uji prasarat analisis, Uji hipotesis dan Metode Penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan uraian tentang analisis penelitian dan temuan penelitian yang diteliti.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menjelaskan uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Perpajakan

Teori memiliki fungsi sebagai wahana yang berguna untuk meramal dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan data fakta pengujian yang ada. Teori merupakan hal yang penting karena sangat berguna sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Teori adalah suatu pernyataan yang sistematis mengenai prinsip yang mendasari seperangkat fenomena. Teori juga bisa dianggap sebagai kerangk atau susunan ide yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi di masa mendatang.<sup>1</sup> Untuk melakukan pemungutan pajak, ada lima teori yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia yang wajib. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing teori:

- a. Teori asuransi merupakan pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga dimasa yang akan datang. Jadi masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat membayar pajak untuk subsidi, keamanan dan lain sebagainya.
- b. Teori kepentingan diibaratkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak.

---

<sup>1</sup> Hery, "Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep Dan Analisis". (Jakarta: PT Grasindo) Hlm.345

- c. Teori gaya pikul pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau badan usaha.
- d. Teori bakti adalah jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bukti kepada negara.
- e. Teori daya beli sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

## 2. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi.<sup>2</sup>

## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Menurut *M. Ray Sommerfeld*, dalam bukunya *An Introduction to Taxation* memberikan definisi yakni pajak

---

<sup>2</sup> Kahono, Sulud. "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di WilayahKP. PBB Semarang*". Tesis untuk program studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2003. Hlm. 16

adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.<sup>3</sup>

Adapula pendapat lain menurut *M.J.H Smeets* adalah yang menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>4</sup>

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ialah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

---

<sup>3</sup> Darwin, “*Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) Hlm. 15

<sup>4</sup> Sukrisno Agoes Dan Estralita T, “*Akuntansi Perpajakan*” (Jakarta: Salemba Empat, 2009) Hlm. 5

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- c. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- e. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Fungsi Pajak**

### **a. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

### **b. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.<sup>5</sup>

### **3. Pajak Daerah**

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Aturan ini menggantikan UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

#### **a. Pajak Provinsi, terdiri dari :**

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Iti Resmi, “*Perpajakan; Teori Dan Kasus*” (Jakarta: Salemba Empat, 2017) Hlm. 03

<sup>6</sup> Mardiasmo. “*Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*”. Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. 2009. Hlm. 13

**b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari:**

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>7</sup>

**C. Pajak Bumi Dan Bangunan****1. Dasar Hukum**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994.<sup>8</sup> Peraturan daerah mengenai Pajak bumi dan bangunan di Pringsewu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14).<sup>9</sup>

**2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan

---

<sup>7</sup> <https://www.hipajak.id> diakses pada tanggal 23 februari 2022 pada pukul 13.45

<sup>8</sup> Mardiasmo. “*Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*”. Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. 2009. Hlm. 24

<sup>9</sup> <https://www.pajakku.com> diakses pada tanggal 23 februari 2022 pada pukul 14.25



pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut waluyo Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau Memperoleh

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 311

<sup>11</sup> Agus Setiawan, H. Hardi. "*Perpajakan Bendaharawan Pemerintah.*" Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm. 25

<sup>12</sup> Waluyo. "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.2007) Hlm. 25

manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.<sup>13</sup>

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.<sup>14</sup> Untuk mempermudah pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan mengelompokkan objek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas didalam penjelasan sebagai berikut:

- a. Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti: sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain.
- b. Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang memiliki fasilitas perkotaan, real state, kompleks pertokoan, industri, perdagangan dan jasa.
- c. Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN, BUMD, maupun swasta.
- d. Sektor Kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti: kayu tebangan, rotan, dammar, dan lainlain.
- e. Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang, seperti: emas, batubara, minyak, gas bumi, dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm. 438

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 436

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 439

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>16</sup>

### **3. Cara Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Untuk menghitung besarnya pajak bumi dan Bangunan (PBB) Yang harus dibayar maka harus diketahui lebih dahulu kelas dari tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi obyek PBB sehingga bisa dihitung NJOP PBB. Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada keputusan Menteri keuangan dan untuk peraturan yang terbaru adalah peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.87.

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm. 437 Dan 438

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp30.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp13.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{PBB} &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp}30.000.000,00 - \\
 &\quad \text{Rp}13.000.000,00) \\
 &= 0,001 \times \text{Rp}17.000.000,00 \\
 &= \text{Rp}17.000,00
 \end{aligned}$$

#### 4. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan

Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- b. 3,5% dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak PBB.<sup>17</sup>

## **5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah- rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- a. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru.
- d. Penentuan nilai jual objek pengganti.

## **6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Berikut ini adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Aulia Sukmawati, "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pbb) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015", Diakses 21 Januari 2022, Pukul 13.40 Wib

- a. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- c. Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya.
- d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal sebagai berikut:
  1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
  2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam no.4 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- f. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam No.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

---

<sup>18</sup> Mardiasmo. "*Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*". Yogyakarta: Andi Edisi Revisi. 2009. Hlm. 319

#### **D. Virus Corona (Covid 19)**

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARSCoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini.<sup>19</sup> Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok.<sup>20</sup> Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader”. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami peningkatan yang

---

<sup>19</sup> Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, *Panduan Praktek Klinis : Pneumonia 2019-nCoV*. (Jakarta : PDPI, 2020), hlm.5

<sup>20</sup> Huang. C, Li.X, dkk, *Clinical Features of Patiens Infected with 2019 novel Coronavirus in Wuhan, China: The Lancet*, 2020, hlm.1.

signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut. Saat ini yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 7.775 orang dan yang dinyatakan Sembuh sebanyak 960 orang dan yang meninggal sebanyak 647 orang. Hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia. Dan ketika kita melihat penyebaran covid-19 terbesar berada di pulau Jawa disini bisa kita lihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi atau covid-19 yang terjadi sehingga banyak orang yang masih tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian tidak melakukan social distancing sehingga perlunya kesadaran bersama demi mendukung pemerintah dalam mencegah atau memutus penyebaran covid-19 menjadi lebih banyak tetapi mari kita bersama-sama melawan agar segera berakhir agar kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.<sup>21</sup>

Belakangan ini covid menjadi konsen besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. hal ini bertolak belakang dengan keadaan Indonesia pada tahun 1997 atau 1998 dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis perbankan, hingga menjalar kepada krisis sosial dan politik yang berakibat besar pada bangsa Indonesia.

Tingginya laju inflasi pada waktu itu menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khusus golongan berpendapatan rendah. Perubahan jumlah uang dapat

---

<sup>21</sup> <https://www.koaminfo.go.id> diakses pada pukul 14.54 wib tanggal 23 maret 2022



mempengaruhi tingkat bunga, dan fungsi konsumsi, jadi jumlah uang menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Hal ini dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, dan mengembalikan ekonomi pasar agar perekonomian akan stabil, suatu sistem ekonomi pasar bebas menjadikan orang bebas untuk bertindak melakukan terbaik bagi dirinya dimana sistem devisa yang terluau bebas tanpa ada pengawasan yang ketat, memungkinkannya arus modal mengalir keluar masuk secara bebas. Hal inilah menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis yang berkepanjangan, selain itu yang menjadi penyebab terjadinya krisis adalah lemahnya sistem perbankan di Indonesia. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal penting dilihat dari perekonomian Indonesia tahun 1997-2000 pertama, kelompok yang mengatakan bahwa krisis disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan sentimen pasar uang secara cepat yang menimbulkan kepanikan finansial.

Kelompok yang mengatakan bahwa krisis timbul karena adanya kelemahan struktur didalam perekonomian nasional, dalam sistem keuangan maupun perbankan. Menurut Djiwandono menamakan kelompok pertama sebagai internationalists, sedangkan kelompok kedua sebagai fundamentalists, selain itu diidentifikasi juga kelompok ketiga new fundamentalists yaitu yang melihat pengaturan dan masalah struktur pada sektor finansial sebagai penyebab krisis.<sup>22</sup> Pada kasus Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejala eksternal timbul, perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejala yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita.

---

<sup>22</sup> <https://Percikaniman.Id/2020/03/16/Socialdistancing-Adalah> diakses pada tanggal 23 maret 2022 pada pukul 13.45

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dari itu bagaimana kita secara bersama –sama membantu yang mempunyai kelebihan bisa membantu yang berkekurangan sesuai apa yang di anut oleh Indonesia. Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.<sup>23</sup>

#### **E. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pringsewu**

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Pentingnya peran ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan adalah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>24</sup>

Namun saat ini indonesia mengalami wabah covid-19. Dimana dampak yang dialami sektor ekonomi saat ini adalah:

---

<sup>23</sup> Sri Pudyatmoko. "Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan", Jakarta: Grasindo. Hlm. 28

<sup>24</sup> Ibid hlm.29

1. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta. Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
3. Impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd).
4. Inflasi/peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen year on-Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina.
7. Angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.
8. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.

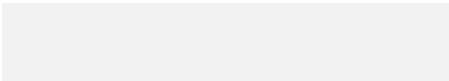
Pertumbuhan Ekonomi di Kecamatan Pringsewu dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan juga tenaga kerja. Namun Pada tahun 2020 Adanya covid-19 ini yang datang di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat menjadi perhatian belakangan

ini, Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh Covid-19, dampak global dari hadirnya virus corona atau bisa disebut sebagai Covid-19 ini menunjukkan bahwa melihat perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri. Akan tetapi ekonomi juga bisa terdampak dari budaya dan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan menyebarnya Covid-19 turut membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Masyarakat.<sup>25</sup>

Dampak dari covid-19 juga mempengaruhi pertumbuhan masyarakat di kecamatan pringsewu. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kecamatan Pringsewu berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 yang meningkat signifikan. Hal itu membuat para kepala pekon (desa) melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kabupaten dan kecamatan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Pringsewu yang turut di hadiri Kepala Kaban Pendapatan Kabupaten Pringsewu Hipni, di gedung DPRD setempat, Senin, 13 Juli 2020.

Dari beberapa sample SPT PBB yang saya dapatkan seperti di kelurahan pringsewu utara, Kecamatan pringsewu, dikeluhkan warga. SPT PBB tahun 2020 naik sangat tinggi. Misalnya pada tahun 2019 PBB hanya sebesar Rp25 ribu, tahun 2020 sebesar Rp105 ribu. Bahkan PBB milik almarhum Haji Kamal yang sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp70 ribu tahun 2020 menjadi Rp700 ribu/bidang.

Sementara pada pertemuan di gedung dewan bersama Komisi II dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Hipni, juga terungkap banyaknya keluhan di lapangan terkait penyesuaian NJOP.



Kepala Pekon Wargomulyo Kecamatan Pardasuka, Mursalin, mengatakan banyak SPT yang ditolak warga karena kenaikan PBB yang dinilai tidak wajar. Mursalin meminta Pemkab dan DPRD bisa mencari formasi atau solusi yang tepat agar penghitungan kenaikan PBB dinilai wajar.

Sementara itu, Kepala Pekon Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Ali Mustofa, mengatakan kenaikan NJOP yang berdampak naiknya PBB juga dinilai asal-asalan. Dia mencontohkan ada pekon yang sama sekali tidak naik target PBB-nya dari tahun 2019 dan 2020, tetapi PBB-nya naik seratus persen dari nilai Rp25 ribu tahun 2019 menjadi Rp50 ribu.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Pendoatan Daerah (Bapenda) Hipni menyatakan siap menampung pengaduan warga jika ada yang keberatan atas kenaikan PBB. Sementara Ketua Komisi II DPRD Anton Subagyo menyarankan agar Bapenda membuat posko pengaduan terkait keberatan warga atas naiknya SPT PBB akibat penyesuaian NJOP.

## **F. Perspektif Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai nilai islam. Sistem ekonomi syariah tentu berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme , dimana sistem ekonomi islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap para pekerjanya dan melarang dan menumpuk kekayaan tanpa ada manfaatnya, selain itu ekonomi islam memiliki ibadah yang teraplikasi dalam tujuan syariah dan moral pada setiap kegiatan ekonomi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muklis dan Didi Suardi , *Pengantar Ekonomi Islam* , editor oleh Safira Diah Febrianti ( Surabaya : CV Jakad Media Publishing , 2020 ) , hlm 29

Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Al-Iqtishad* al-islami. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan. Maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak meyimpang dari kebenaran. Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat oleh ajaran islam, kebijakan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.<sup>27</sup>

Dasar hukum ekonomi islam melalui ushul fiqh, berlandaskan pada Al - Qur'an, sunnah, dan ijtihad.

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kalam Allah swt yang disampaikan kepada nabi muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat jibril dari mulai surah al-fatihah dan diakhiri surah an-nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-qur'an merupakan dasar hukum ekonomi islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syariat islam, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah global beserta rinciannya. Ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan ekonomi misalnya pada ayat Al-baqarah 188 yang menjelaskan dalam memperoleh harta harus dengan cara yang baik

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

---

<sup>27</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya* , Edisi 1 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 2-3

*Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS Al-Baqarah Ayat 188).*

#### b. As-Sunnah

As-sunnah atau sering disebut al-hadits mempunyai arti yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrirnya. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Hai orang - orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS An-Nisa Ayat 59).*

#### c. Ijtihad

Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara' dan dalil

terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yaitu ijmaa' dan qiyas.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi islam dalam suatu negara bertujuan untuk:

- a. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara negra muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah.
- e. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. Falah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Itang, "Teori Ekonomi Islam" editor oleh Nur Arifin (Serang baru: Penerbit Laksita Indonesia, 2015), hlm 37-45

<sup>29</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya", Edisi 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) , hlm 3-4



- f. Tujuan paling penting adalah membuat distribusi sumber sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata.<sup>30</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi islam, berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan dari Tuhan kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk alat produksi dan faktor produksi.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Pemilikan kekaayaan pribadi harus berperaan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari akhir.
- g. Seseorang yang kelebihan harta tau kekaayaannya dan mencaapai nisab tertentu diwajibkan membayaar zakat.<sup>31</sup>

### 4. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik Ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al amaliyah i-islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Muhammad Sharif Chaudry , *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar ( Fundamental of Islamic Economic Economic System)*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group , 2012) , hlm 32

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, editor oleh Tim Fokker, Edisi 1 (Cirebon: CV Elsi Pro. 2015), hlm 75-77

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta; Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah, Kedua manusia adalah khalifah atas harta miliknya .
- b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan moral.
- c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan; Islam menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa yang dilakukan di dunia ini hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan akhirat termasuk dalam ekonomi.
- d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.
- e. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.
- f. Perintah zakat dalam Ekonomi Islam kepada orang yang berhak menerimanya yang tidak terdapat pada perekonomian lain.
- g. Larangan riba; berusaha menjauhkan bunga atau riba dalam transaksi ekonomi.<sup>32</sup>

### **G. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga berkaitan dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Mustafa edwin nasution, *pengenalan eksklusif ekonomi islam*, edisi pertama (depok: kencana, 2006) hlm.18-29

<sup>33</sup> Almizan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Juni-Desember 2016, H. 20

M. Umer Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayyatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah.

Dalam bukunya *Islam and The Islamic Challenge* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Islam dan Tantangan Ekonomi“ M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan worldview (pandangan) maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.<sup>34</sup>

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S AL- A'raf ayat 69

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ  
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً  
فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

*Artinya: “Dan heranlah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum*

---

<sup>34</sup> Anindya Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Vol. 2, No. 1, Desember 2013, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

*Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.”<sup>35</sup>*

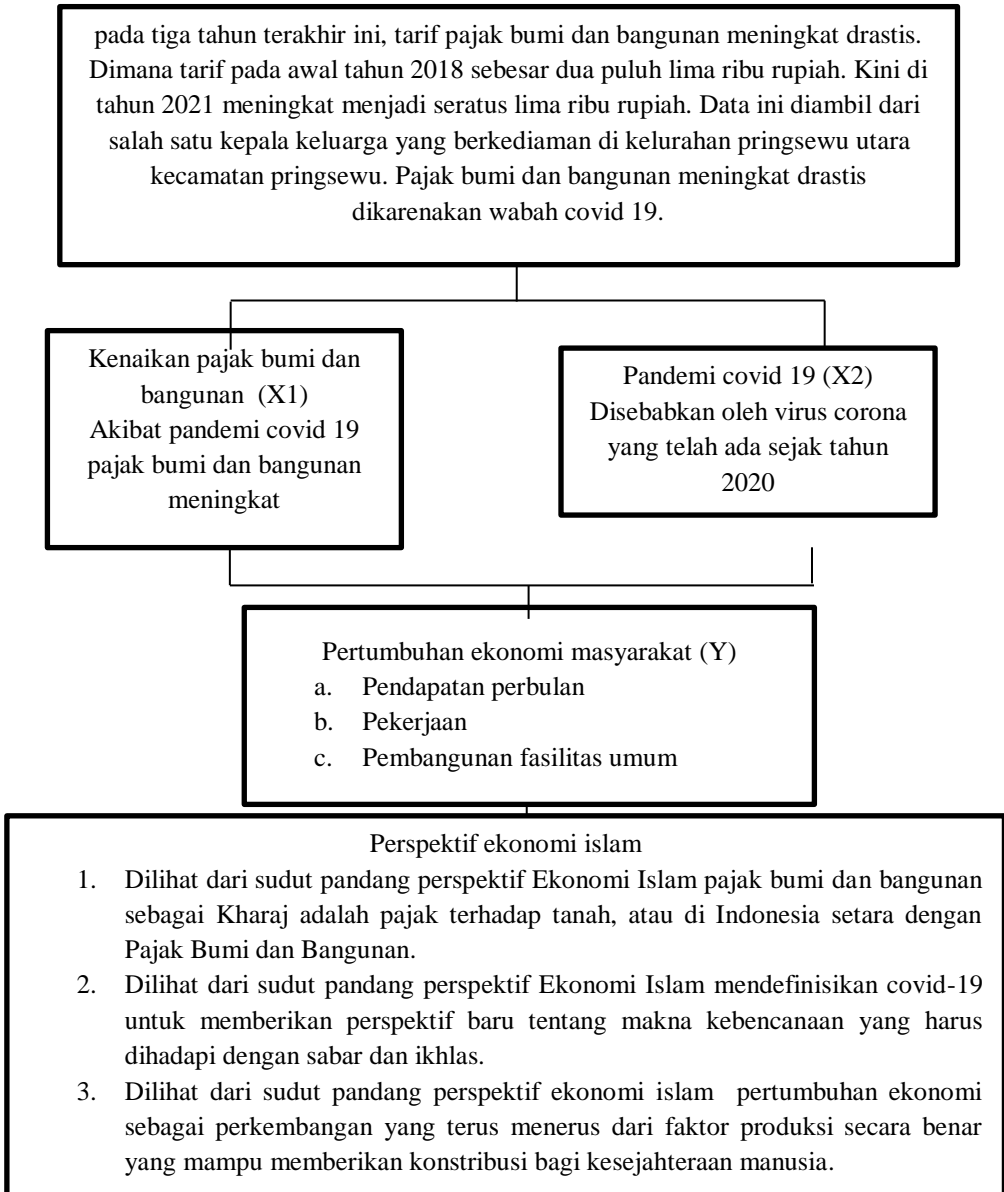
Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istigfar atau meminta ampun. Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan kesetabilan hidup.

#### **H. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai adanya pengaruh kenaikan pajak bumi dan bangunan pada masa pandemi covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam (studi pada masyarakat di kecamatan pringsewu). covid-19 sangat berdampak luas kepada nasib masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya di sektor perdagangan. Apalagi dampak covid-19 membuat kenaikan pajak bumi bangunan di kecamatan pringsewu. namun penulis berfikir apakah kenaikan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pembangunan di kecamatan pringsewu menjadi lebih baik atau menurun.

---

<sup>35</sup> Al-Quran Surat Ke 7 Ayat 69



**Gambar 2.1**

**Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu)**

## I. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan dari kerangka berfikir yang menjelaskan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan meningkatnya NJOP pajak bumi dan bangunan. Akibat dari kenaikan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu semakin meningkat atau bahan merosot jauh bahkan tertinggal. Seperti apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi di kecamatan pringsewu lebih baik, pengaruh dari kenaikan pajak bumi dan bangunan membuat bangunan di sekitar kecamatan pringsewu menjadi lebih baik, atau sebaliknya.

Berikut ini adalah model persamaan regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + e.$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di kecamatan pringsewu

X1 = Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan

X2 = Pandemi Covid-19

$\alpha$  = Konstanta

e. = Error

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh kenaikan pajak bumi dan bangunan (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu (Y).

kenaikan pajak bumi dan bangunan adalah dimana kondisi pada saat pandemi covid-19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu. namun apakah dampak dari kenaikan tersebut membuat perekonomian masyarakat di kecamatan pringsewu semakin membaik atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H0<sub>1</sub>: Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu.**

**Ha<sub>1</sub>: Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu.**

2. Pengaruh Pengetahuan Pandemi Covid 19 (X<sub>2</sub>) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pringsewu (Y).

Pengetahuan pandemi covid-19 adalah dimana masyarakat paham akan pandemi covid-19 yang sedang dialami oleh masyarakat di kecamatan pringsewu. namun apakah pemahaman dari pandemi covid-19 tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H0<sub>2</sub>: Pengetahuan Pandemi Covid-19 Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu.**

**Ha<sub>2</sub> : Pengetahuan Pandemi Covid-19 Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu.**

3. Pengaruh Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Kenaikan pajak bumi dan bangunan dimana keadaan memaksa masyarakat membayar pajak yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut di pengaruhi oleh pandemi covid-19. Namun apakah hal tersebut dapat mengubah keadaan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat di kecamatan pringsewu. berdasrakan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H0s: Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

**Ha: Kenaikan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**



## LAMPIRAN- LAMPIRAN

### 1. Surat persetujuan riset lokasi penelitian

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b> <b>KECAMATAN PRINGSEWU</b> <b>KELURAHAN PRINGSEWU UTARA</b> Alamat: Jl. Raya kh. ghalih. Kode pos 35373
<b>SURAT REKOMENDASI</b> Nomor: 130/052/PK/2022	
Kepala Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Dengan Ini Menyarankan Bahwa:	
Nama	: Ima A'yunin Nadhirah
Npm	: 1851030373
Pekerjaan	: Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Syariah
Alamat	: Jl. H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung
Lamanya Penelitian	: Januari s.d Selesai
Tujuan	: Ini Melakukan Pra Riset Guna Penulisan Skripsi
Judul Penelitian	: Pengaruh Kesulitan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Pringsewu).
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Pringsewu, 22 Januari 2022 Kepala Kelurahan Pringsewu Utara	
 Anshoruddin Lidinillah	

Scanned by TapScanner

## 2. Pernyataan kuesioner

Nama :  
 Jenis kelamin :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Pendapatan/bulan :  
 Pendidikan :

No.	PERNYATAAN	SS	S	RG	TS	STS
<b>Variabel kenaikan pajak bumi dan bangunan (X1)</b>						
1	Saya merasa terbebani akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan.					
2	Pengeluaran semakin banyak akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan					
3	Respon saya diadakannya penurunan dari pajak bumi dan bangunan					
4	Saya merasa tidak ada efek yang lebih dari kenaikan pajak bumi bangunan dalam kehidupan sehari hari.					
5	Saya merasa ada baiknya dari kenaikan PBB seperti akses jalan semakin baik.					

<b>Variabel pandemi covid-19 (X2)</b>						
1	Saya tahu apa itu virus corona 2019 (covid-19) yang baru baru ini ada.					
2	Covid-19 secara tidak sengaja dikeluarkan dari laboratorium penelitian.					
3	Sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat tidak dapat puih dari infeksi covid-19 tanpa diberi pengobatan.					
4	Saya berlatih menjaga jarak sosial (membatasi kontak yang tidak perlu dengan orang orang) untuk menghindari covid-19					
5	Orang orang harus mencuci tangan dengan sabun secara teratur selama 20-30 detik.					
<b>Variabel Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Y)</b>						
1	Saya merasa pendapatan semakin menurun					
2	Saya merasa kebutuhan hidup semakin meningkat					
3	Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin menurun akibat kenaikannya pajak					

	bumi dan bangunan					
4	Disisi lain kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan pringsewu semakin membaik					
5	Kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat					

### 3. Bukti atas kenaikan PBB dari tahun 2018-2020

Pada tahun 2018. Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sebesar Rp25.000

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018  
REKAMAS, BANGKALAN

KEPADA: PT. SUPRI JAYA S.A.  
JL. SUPRI JAYA S.A. 1  
PT. SUPRI JAYA S.A.  
PT. SUPRI JAYA S.A.  
PT. SUPRI JAYA S.A.  
PT. SUPRI JAYA S.A.

NO. SURAT	LUAS DASAR	PELAKS	SUPEK PER M <sup>2</sup> DASAR	TOTAL PAJAK PBB
1	1000	1000	25000	25000

PBB yang terhutang: Rp 25.000,00

TAKSI BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIMPAKAI: Rp 0,00

TOTAL PAJAK PBB: Rp 25.000,00

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018

PT. SUPRI JAYA S.A.

**Gambar 0.01**

Pada tahun 2019 pajak bumi dan bangunan masih stabil

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG**  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019  
REKAMAS, BANGKALAN

KEPADA: PT. SUPRI JAYA S.A.  
JL. SUPRI JAYA S.A. 1  
PT. SUPRI JAYA S.A.  
PT. SUPRI JAYA S.A.  
PT. SUPRI JAYA S.A.

NO. SURAT	LUAS DASAR	PELAKS	SUPEK PER M <sup>2</sup> DASAR	TOTAL PAJAK PBB
1	1000	1000	25000	25000

PBB yang terhutang: Rp 25.000,00

TAKSI BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIMPAKAI: Rp 0,00

TOTAL PAJAK PBB: Rp 25.000,00

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019

PT. SUPRI JAYA S.A.

**Gambar 0.02**



#### 4. Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah di kumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber penelitian selanjutnya dapat diperoleh data data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan perbulan, dan pendidikan.

Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang di berikan atas pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan untuk mengetahui apakah masyarakat di kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu merasa terbebani akibat dari kenaikan tersebut atau tidak. Analisis secara objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui dampak dari kenaikan pajak bumi dan bangunan yang diakibatkan oleh wabah covid-19 pada masyarakat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung, peneliti menggunakan kategori kenaikan pajak bumi dan bangunan dengan indikator pajak, pajak bumi dan bangunan, pandemi covid 19 dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pernyataan variabel pertama tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan kepada bapak tugi selaku masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar induk di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022. Pernyataan pertama tentang saya merasa terbebani akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan beliau memilih pernyataan sangat setuju dengan skor 5 (lima); Pernyataan kedua tentang pengeluaran semakin banyak akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan dan memilih pernyataan setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang respon saya diadakannya penurunan pajak bumi dan bangunan dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan keempat tentang saya merasa tidak ada efek yang lebih dari kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam kehidupan sehari hari dan memilih ragu ragu dengan skor 3 (tiga); Pernyataan kelima

tentang saya merasa ada baiknya dari kenaikan pajak bumi dan bangunan seperti akses jalan semakin baik dan memilih ragu ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel kedua tentang pandemi covid-19 yang dilakukan kepada bapak tugi selaku masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar induk di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari sabtu, tanggal 23 April 2022. Pernyataan pertama tentang saya tahu apa itu virus corona 2019 (covid-19) yang baru baru ini ada dan memilih setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kedua tentang covid-19 secara tidak sengaja dikeluarkan dari laboratorium penelitian dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan ketiga tentang sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat tidak dapat pulih dari infeksi covid-19 tanpa diberi pengobatan dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang saya berlatih menjaga jarak sosial (membatasi kontak yang tidak perlu dengan orang orang) untuk menghindari covid-19 dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan kelima tentang orang orang harus mencuci tangan dengan sabun secara teratur selama 20-30 detik dan memilih setuju dengan skor 4 (empat).

Pernyataan variabel ketiga tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat 19 yang dilakukan kepada bapak tugi selaku masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar induk di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari sabtu tanggal 23 April 2022. Pernyataan pertama tentang Saya merasa pendapatan semakin menurun dan memilih jawaban setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan kedua tentang Saya merasa kebutuhan hidup semakin meningkat dan memilih skor setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin menurun akibat kenaikannya pajak bumi dan bangunan dan memilih jawaban ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang Di sisi lain kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan pringsewu semakin membaik



dan memilih sangat tidak setuju dengan skor 2 (dua); pernyataan kelima tentang Kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel pertama tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan kepada Mas alan selaku masyarakat yang di PHK dari salah satu perusahaan yang berada di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Selasa, tanggal 10 mei 2022. Pernyataan pertama tetang saya merasa terbebani akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan beliau memilih pernyataan sangat setuju dengan skor 5 (lima); Pernyataan kedua tentang pengeluaran semakin banyak akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan dan memilih pernyataan sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan ketiga tentang respon saya diadakannya penurunan pajak bumi dan bangunan dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan keempat tentang saya merasa tidak ada efek yang lebih dari kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam kehidupan sehari hari dan memilih setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kelima tentang saya merasa ada baiknya dari kenaikan pajak bumi dan bangunan seperti akses jalan semakin baik dan memilih ragu ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel kedua tentang pandemi covid-19 yang dilakukan kepada Mas Alan selaku masyarakat yang di PHK dari salah satu perusahaan yang berada di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022. Pernyataan pertama tetang saya tahu apa itu virus corona 2019 (covid-19) yang baru baru ini ada dan memilih setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kedua tentang covid-19 secara tidak sengaja dikeluarkan dari laboratorium penelitian dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan ketiga tentang sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat tidak dapat puih dari infeksi covid-19 tanpa diberi pengobatan dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang saya berlatih menjaga jarak sosial (membatasi kontak yang tidak perlu

dengan orang-orang) untuk menghindari covid-19 dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan kelima tentang orang-orang harus mencuci tangan dengan sabun secara teratur selama 20-30 detik dan memilih setuju dengan skor 4 (empat).

Pernyataan variabel ketiga tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat 19 yang dilakukan kepada Mas Alan selaku masyarakat yang di PHK dari salah satu perusahaan yang berada di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Pernyataan pertama tentang Saya merasa pendapatan semakin menurun dan memilih jawaban setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan kedua tentang Saya merasa kebutuhan hidup semakin meningkat dan memilih skor sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan ketiga tentang Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin menurun akibat kenaikannya pajak bumi dan bangunan dan memilih jawaban ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang Disisi lain kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan pringsewu semakin membaik dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan kelima tentang Kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel pertama tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan kepada ibu Mar selaku masyarakat yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Pernyataan pertama tentang saya merasa terbebani akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan beliau memilih pernyataan setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kedua tentang pengeluaran semakin banyak akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan dan memilih pernyataan setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang respon saya diadakannya penurunan pajak bumi dan bangunan dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan keempat tentang saya merasa tidak ada efek yang lebih dari kenaikan pajak bumi dan

bangunan dalam kehidupan sehari-hari dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); Pernyataan kelima tentang saya merasa ada baiknya dari kenaikan pajak bumi dan bangunan seperti akses jalan semakin baik dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel kedua tentang pandemi covid-19 yang dilakukan kepada ibu rumah tangga selaku masyarakat yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Pernyataan pertama tentang saya tahu apa itu virus corona 2019 (covid-19) yang baru-baru ini ada dan memilih setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kedua tentang covid-19 secara tidak sengaja dikeluarkan dari laboratorium penelitian dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan ketiga tentang sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat tidak dapat puih dari infeksi covid-19 tanpa diberi pengobatan dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang saya berlatih menjaga jarak sosial (membatasi kontak yang tidak perlu dengan orang-orang) untuk menghindari covid-19 dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan kelima tentang orang-orang harus mencuci tangan dengan sabun secara teratur selama 20-30 detik dan memilih setuju dengan skor 4 (empat).

Pernyataan variabel ketiga tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat 19 yang dilakukan kepada ibu rumah tangga selaku masyarakat yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Pernyataan pertama tentang Saya merasa pendapatan semakin menurun dan memilih jawaban setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan kedua tentang Saya merasa kebutuhan hidup semakin meningkat dan memilih skor setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin menurun akibat kenaikannya pajak bumi dan bangunan dan memilih jawaban ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang Disisi lain kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan pringsewu semakin membaik dan memilih

sangat tidak setuju dengan skor 2 (dua); pernyataan kelima tentang Kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel pertama tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan kepada ibu yati selaku guru yang merasakan WFH di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari kamis, tanggal 02 juni 2022. Pernyataan pertama tentang saya merasa terbebani akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan beliau memilih pernyataan sangat setuju dengan skor 5 (lima); Pernyataan kedua tentang pengeluaran semakin banyak akibat kenaikan pajak bumi dan bangunan dan memilih pernyataan setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang respon saya diadakannya penurunan pajak bumi dan bangunan dan memilih sangat setuju dengan skor 5 (lima); pernyataan keempat tentang saya merasa tidak ada efek yang lebih dari kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam kehidupan sehari hari dan memilih ragu ragu dengan skor 3 (tiga); Pernyataan kelima tentang saya merasa ada baiknya dari kenaikan pajak bumi dan bangunan seperti akses jalan semakin baik dan memilih ragu ragu dengan skor 3 (tiga).

Pernyataan variabel kedua tentang pandemi covid-19 yang dilakukan kepada kepada ibu yati selaku guru yang merasakan WFH di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari kamis, tanggal 02 juni 2022. Pernyataan pertama tentang saya tahu apa itu virus corona 2019 (covid-19) yang baru baru ini ada dan memilih setuju dengan skor 4 (empat); Pernyataan kedua tentang covid-19 secara tidak sengaja dikeluarkan dari laboratorium penelitian dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan ketiga tentang sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat tidak dapat puih dari infeksi covid-19 tanpa diberi pengobatan dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang saya berlatih menjaga jarak sosial (membatasi kontak yang tidak perlu dengan orang orang) untuk menghindari covid-19 dan memilih sangat setuju dengan skor 5

(lima); pernyataan kelima tentang orang-orang harus mencuci tangan dengan sabun secara teratur selama 20-30 detik dan memilih setuju dengan skor 4 (empat).

Pernyataan variabel ketiga tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat 19 yang dilakukan kepada ibu Yati Selaku guru yang merasakan WFH di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022. Pernyataan pertama tentang Saya merasa pendapatan semakin menurun dan memilih jawaban setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan kedua tentang Saya merasa kebutuhan hidup semakin meningkat dan memilih skor setuju dengan skor 4 (empat); pernyataan ketiga tentang Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan semakin menurun akibat kenaikannya pajak bumi dan bangunan dan memilih jawaban ragu-ragu dengan skor 3 (tiga); pernyataan keempat tentang Disisi lain kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat kecamatan Pringsewu semakin membaik dan memilih sangat tidak setuju dengan skor 2 (dua); pernyataan kelima tentang Kenaikan pajak bumi dan bangunan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memilih ragu-ragu dengan skor 3 (tiga).

## 5. Dokumentasi wawancara

<p>Wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar induk kecamatan pringsewu, bapak tugi</p>	
<p>Wawancara dengan masyarakat yang terkena PHK dari salah satu perusahaan yang ada di kecamatan pringsewu, mas alan</p>	
<p>Wawancara dengan ibu rumah tangga yang berada di kecamatan pringsewu, ibu mar</p>	
<p>Wawancara dengan salah satu guru yang merasakan dampak WFH yang berada di kecamatan pringsewu, ibu yati</p>	

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN WARGA  
MASYARAKAT DI KECAMATAN PRINGSEWU**









**6. Rekapitan hasil jawaban responden**  
**a. Variabel pandemi covid-19 (X1)**

no.	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	total X1
1	5	4	3	4	2	18
2	4	5	4	4	4	21
3	5	4	4	3	5	21
4	4	5	4	4	4	21
5	5	5	4	2	5	21
6	4	4	3	4	4	19
7	5	4	5	4	5	23
8	5	5	4	4	4	22
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	5	2	5	19
11	5	5	4	4	4	22
12	5	3	4	2	3	17
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	4	4	23
15	4	4	4	3	5	20
16	4	3	4	4	4	19
17	5	5	4	2	4	20
18	4	4	5	4	4	21
19	5	5	4	4	3	21
20	4	4	4	4	4	20
21	5	3	5	4	4	21
22	4	5	4	4	4	21
23	5	4	4	4	2	19
24	4	5	4	4	4	21
25	5	4	5	4	4	22
26	5	4	3	5	2	19
27	5	5	4	4	4	22
28	4	4	5	4	4	21

29	5	5	4	5	3	22
30	3	4	4	4	4	19
31	5	5	4	4	4	22
32	5	4	3	5	3	20
33	4	3	4	4	4	19
34	5	4	4	4	4	21
35	5	5	3	5	4	22
36	4	2	4	4	4	18
37	5	4	2	5	2	18
38	4	5	4	4	4	21
39	5	4	4	4	3	20
40	4	2	4	4	4	18
41	4	4	2	4	4	18
42	3	5	4	4	4	20
43	3	4	2	5	4	18
44	5	4	4	3	3	19

**b. Variabel kenaikan pajak bumi dan bangunan (X2)**

<b>no</b>	<b>x2.1</b>	<b>x2.2</b>	<b>x2.3</b>	<b>x2.4</b>	<b>x2.5</b>	<b>totalX2</b>
1	5	1	5	3	4	18
2	4	5	3	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	3	5	3	4	19
5	5	4	4	4	4	21
6	4	5	3	4	4	20
7	4	4	5	3	4	20
8	5	4	4	4	3	20
9	4	5	3	5	4	21
10	4	4	4	4	4	20
11	5	5	3	5	4	22
12	4	4	4	4	4	20
13	2	4	4	4	4	18
14	4	4	5	2	5	20
15	5	5	3	5	4	22
16	4	4	4	4	3	19
17	4	4	4	4	4	20
18	5	4	5	2	5	21
19	4	3	5	2	4	18
20	4	4	4	4	4	20
21	5	4	4	4	3	20
22	5	3	5	4	4	21
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	5	4	4	21
26	5	3	5	4	4	21
27	4	4	5	4	4	21
28	5	4	5	4	2	20

<b>29</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
<b>30</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>31</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>33</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>34</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>36</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21</b>
<b>37</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>38</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>39</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>40</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
<b>41</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
<b>42</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
<b>43</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
<b>44</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

**c. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Y)**

<b>no</b>	<b>y1</b>	<b>y2</b>	<b>y3</b>	<b>y4</b>	<b>y5</b>	<b>totalY</b>
1	5	5	4	5	4	23
2	4	5	3	5	3	20
3	5	4	3	5	4	21
4	4	5	3	5	3	20
5	4	5	3	5	4	21
6	5	4	3	4	3	19
7	4	5	4	3	5	21
8	5	4	3	4	4	20
9	5	4	2	5	3	19
10	4	5	3	5	4	21
11	4	5	3	5	4	21
12	5	5	3	4	3	20
13	4	5	3	5	4	21
14	5	4	3	5	3	20
15	4	5	4	5	4	22
16	5	4	3	5	3	20
17	5	4	3	4	4	20
18	4	5	3	5	3	20
19	5	4	3	5	4	21
20	4	5	3	5	4	21
21	5	4	3	4	4	20
22	4	5	3	5	4	21
23	5	4	3	5	4	21
24	5	4	3	5	4	21
25	4	5	3	4	3	19
26	5	4	3	5	4	21
27	3	5	3	4	5	20
28	5	4	3	5	4	21
29	3	5	3	4	3	18
30	5	4	3	5	4	21

31	5	5	3	4	3	20
32	4	5	3	5	3	20
33	5	4	3	4	3	19
34	4	5	3	3	5	20
35	5	5	3	4	3	20
36	4	5	3	4	3	19
37	5	4	3	4	3	19
38	5	5	3	4	3	20
39	5	4	3	4	3	19
40	5	5	3	3	5	21
41	5	4	3	4	3	19
42	5	5	3	4	3	20
43	5	3	3	4	3	18
44	5	5	2	4	3	19



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Sarimin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radrintan.ac.id](http://www.radrintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-4230/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan Bahwa SKRIPSI Dengan Judul :

**PENGARUH KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MASA PANDEMI COVID 19  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Isma A'yunin Nadhirah	1851030373	FEBI/AS

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 04 Juli 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan

Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



# Skripsi\_Isna A'yunin Nadhirah

*by Isna A'yunin Nadhirah*

---

**Submission ID:** 1862554984

**File name:** BAB\_I,\_IV,\_DAN\_V\_ISNA\_A\_YUNIN\_NADHIRAH.docx (100.61K)

**Word count:** 7011

**Character count:** 44351

## Skripsi\_Isna A'yunin Nadhirah

### ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%
3	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	2%
4	Submitted to East High School Student Paper	1%
5	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
7	Zulfikar Pratama Basir, Lukman Chalid, Nurhayati Aziz. "Pengaruh Pendidikan, Fasilitas Kerja dan Kepemimpinan Terhadap	1%

Kinerja Guru pada SMA Negeri 12 Makassar",  
PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021

Publication

---

8	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	1 %
11	Submitted to Cedar Valley College Student Paper	1 %
12	Sabinus Beni, Blasius Manggu. "PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENUMBUHKAN JIWA WIRUSAHA", JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2019 Publication	1 %
13	Submitted to Myongji University Graduate School Student Paper	1 %
14	Karmilah, Sobarudin. "Konsep Dan Dinamika Komunikasi Antarbudaya di Indonesia", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	1 %

---

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches = 5 words